

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Hak Masyarakat Daerah Terpencil atas Layanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan SPBE belum sepenuhnya memenuhi indikator implementasi kebijakan. Dari aspek komunikasi, sosialisasi mengenai SPBE kepada masyarakat maupun pemerintah desa masih belum optimal sehingga pemahaman terhadap layanan berbasis elektronik masih rendah. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan SPBE masih terkendala keterbatasan jaringan internet, gangguan listrik, fasilitas pendukung, serta kemampuan aparatur dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dari aspek disposisi, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam

menerapkan SPBE melalui berbagai aplikasi dan layanan digital, namun implementasinya belum didukung oleh upaya yang berkelanjutan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara merata. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi pelaksanaan SPBE telah berjalan, namun belum diikuti dengan pemerataan pelayanan hingga ke seluruh wilayah Kecamatan Kinal. Akibatnya, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau, dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 belum sepenuhnya terpenuhi.

2. Pemenuhan hak masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui SPBE berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik yang mudah diakses, memberikan kepastian pelayanan, perlakuan yang sama, serta memperoleh informasi yang jelas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik berupa keterbatasan akses internet dan sarana pendukung maupun belum optimalnya penyebaran informasi serta pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil. Kondisi tersebut menyebabkan hak masyarakat

atas pelayanan publik berbasis elektronik belum dapat diwujudkan secara menyeluruh.

3. Berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, implementasi hak masyarakat atas layanan publik melalui SPBE belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Meskipun pemerintah telah melaksanakan kebijakan SPBE melalui penyediaan berbagai sistem pelayanan berbasis elektronik, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjamin akses pelayanan yang merata bagi masyarakat daerah terpencil. Dengan demikian, prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* yang menekankan pelaksanaan pemerintahan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat masih perlu diwujudkan secara lebih optimal melalui peningkatan infrastruktur digital, pemerataan akses pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

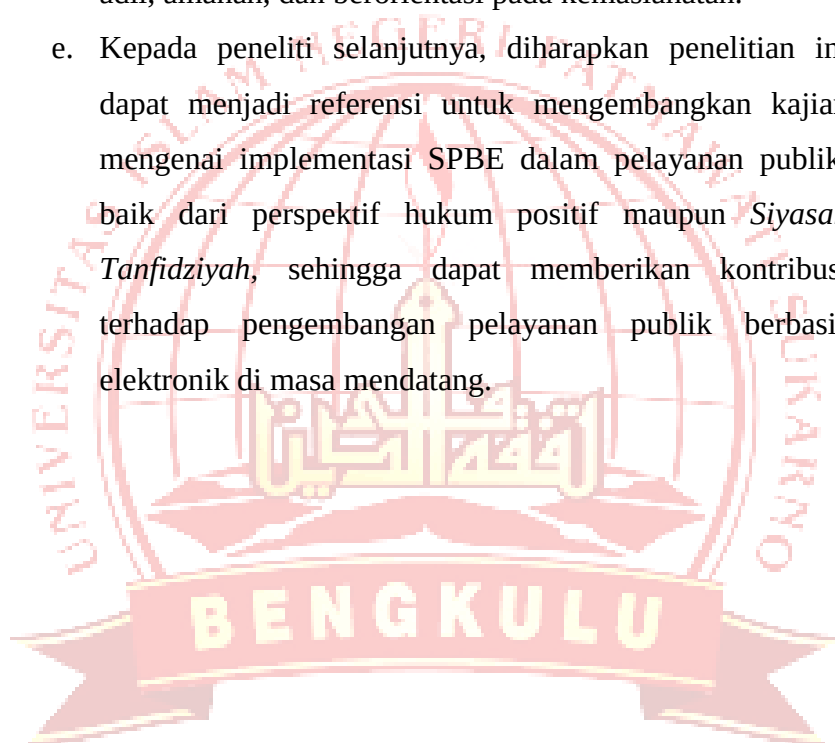
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur), maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur jaringan internet serta fasilitas pendukung SPBE agar pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik dapat berjalan secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelayanan berbasis elektronik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Kepada Pemerintah Kecamatan Kinal dan Pemerintah Desa, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mendukung implementasi SPBE melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana pendukung, serta pendampingan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik berbasis elektronik.
- c. Kepada masyarakat Kecamatan Kinal, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam memanfaatkan layanan publik berbasis elektronik serta aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga pelayanan publik berbasis elektronik dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
- d. Kepada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, diharapkan pelaksanaan SPBE tidak hanya berorientasi pada penyediaan aplikasi dan sistem digital, tetapi juga

memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses secara mudah, efektif, dan merata oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya selaras dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kebijakan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan.

- e. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi SPBE dalam pelayanan publik, baik dari perspektif hukum positif maupun *Siyasah Tanfidziyah*, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Al-Qur'an. Q.S. An-Nisā' (4): 58. Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Al-Qur'an. Q.S. An-Nisā' (4): 135. Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Al-Qur'an. Q.S. An-Nahl (16): 90. Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Al-Qur'an. Q.S. Asy-Syūrā (42): 38. Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Al-Qur'an. Q.S. Al-Hujurāt (49): 13. Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

B. Buku

Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2010.

Abu Fahhmi. *HRD Syari'ah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2011.

Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2020.

Husain As. *Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal*. Makassar: Syakira Media Press, 2022.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Katarina, Riris. *Transformasi Digital dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. *Masterplan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: KemenPAN-RB, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Rasyid, S. *Teori dan Praksis Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suwarsono, S. *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

C. Jurnal Ilmiah

Ahmad, Zakly Hanafi, dkk. "Analisis Upaya Strategis dalam Memaksimalkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Desa." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 3, 2022.

Afrizal, Oktaviano. "The Principle of Justice in the Rules of Fiqh Siyasah and Its Application in Indonesia." *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 7, No. 2, 2024.

Aini, Nur. "Fiqh Siyasah dan Implikasinya terhadap Lembaga Eksekutif dalam Pemerintahan Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Amiruddin. "Implementasi Konsep Siyasaḥ Tanfidziyah dalam Pemerintahan Islam." *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023.

Andiko, Toha. "Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah." *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 2011. *(Kalau ini dipindahkan ke Buku karena bukan jurnal)*.

Daud, Penisia, Nurkaidah Nurkaidah, dan Zainuddin Mustapa. "Transparansi Pelayanan Publik di Era Digital pada Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Perbatasan Nunukan." *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration*, Vol. 4, No. 2, 2025.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Fauzan, Ahmad. "Kaidah Fiqhiyyah Sebagai Instrumen Ijtihad dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 180, 2022.

Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm." *Mazahib*, Vol. 15, No. 1, 2016.

Hilal, Fatmawati. "Fikih Siyasaḥ." *Repositori UIN Alauddin Makassar*, 2022.

- Huda, Nurul. "Kaidah Fiqhiyyah dan Relevansinya terhadap Perkembangan Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Al-Daulah*, 2023.
- Harius Eko Saputro. "Kualitas Pelayanan Publik." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Hidayat, Muhammad Taufiq, dan Yohanes Sri Guntur. "Transformasi Digital Melalui Implementasi E-Government pada Organisasi Sektor Publik." *Majalah Ekonomi*, Vol. 31, No. 2, 2025.
- Hudri, Misbah. "Pembacaan Kontekstual Ayat 'Berhukum dengan Hukum Allah' (Narasi Kontra NKRI Bersyariah)." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Ikhbaluddin. "Pelayanan Publik Berbasis Online di Desa (Studi pada Desa Permisan Kecamatan Jabon)." *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Makfiyati, Nida, dkk. "Ijma' Sukuti dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy dan Taqiyudin An-Nabhani." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Muzaki, Achmad, dan Zefry Luttadinata. "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan

Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 7, 2024.

Prasetyo, Budi, Damianus Naijes, Nizma Yuraida, Subagio, dan Totok Suryanto. “Digital Governance Transformation: How E-Government Initiatives Are Shaping Public Service Efficiency.” *Join: Journal of Social Science*, Vol. 1, No. 6, 2024.

Regina Argianti, dan Dede Sri Kartini. “Penerapan E-Government dalam Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan di Daerah Terpencil: Evaluasi Keberhasilan dan Kendala.” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 1, 2025.

Roring, Andreas Delpiero, Michael S. Mantiri, dan Marlien T. Lapian. “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona (Covid-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Sawir, Muhammad, dkk. “Birokrasi Papua Bangkit: Menjawab Tantangan Pelayanan di Daerah Terpencil dengan Inovasi dan Keberanian.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 5, No. 1, 2024.

Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan, dan Herlan. "The Dilemma in Neutralizing the State Civil Apparatus (ASN) and Alternative Solutions." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Taufiqurokhman, Tony Pathony, Fritz Hotman Syahmahita Damanik, Arif Nurhakim, dan Loso Judijanto. "Transformasi E-Government: Mengevaluasi Dampak Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik." *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Taufiqurokhman, dan Ismail Nurdin. "Kesenjangan Digital dalam Implementasi E-Government di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 20, No. 1, 2019.

Tinggogoy, Deiby Christiana. "Pelayanan Publik: Antara Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah." *Journal of Indonesian Public Administration and Government Studies (GIPAGS)*, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2021 tentang
*Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.

E. Hasil Wawancara

Data Hasil Wawancara dengan Ibu Annisa Olvadilah,
selaku masyarakat Desa Gedung Wani, tanggal 5
April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Asmanto,
selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kinal
Kabupaten Kaur, tanggal 10 April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Bapak Doni Fatriansyah,
selaku Kepala Desa Talang Berangin, tanggal 6
April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Bapak Francisco, selaku
Kepala Staf Bidang *E-Government* Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaur,
tanggal 7 April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Bapak Khori Afrihiko,
selaku Staf Bidang *E-Government* Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaur,
tanggal 3 April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Ibu Nesa, selaku
masyarakat Desa Jawi, tanggal 8 April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Ibu Nur, selaku
masyarakat Desa Talang Berangin, tanggal 14
April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Ibu Riri, selaku
masyarakat Desa Talang Berangin, tanggal 9 April
2026.

Data Hasil Wawancara dengan Ibu Titi, selaku
masyarakat Desa Jawi, tanggal 12 April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, selaku
Kepala Desa Gedung Wani, tanggal 2 April 2026.

Data Hasil Wawancara dengan Ibu Weki, selaku
masyarakat Desa Gedung Wani, tanggal 11 April
2026.

Data Hasil Wawancara dengan Bapak Yendra Haito,
selaku Kepala Desa Jawi, tanggal 4 April 2026.